

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat vital bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan juga bisa dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang kemudian berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya jika mutu pendidikan suatu negara rendah akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah yang berdampak pada kemunduran suatu bangsa. Dunia pendidikan kita saat ini dihadapkan pada berbagai macam tantangan, baik tantangan yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Salah satu tantangan besar dunia pendidikan dari luar negeri yaitu masuknya persaingan global. Indonesia mau tidak mau ikut dalam era globalisasi agar tidak menjadi negara yang tertinggal dengan negara-negara lainnya di dunia. Gambaran rendahnya mutu pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia bisa kita saksikan pada beberapa fakta sebagai berikut.

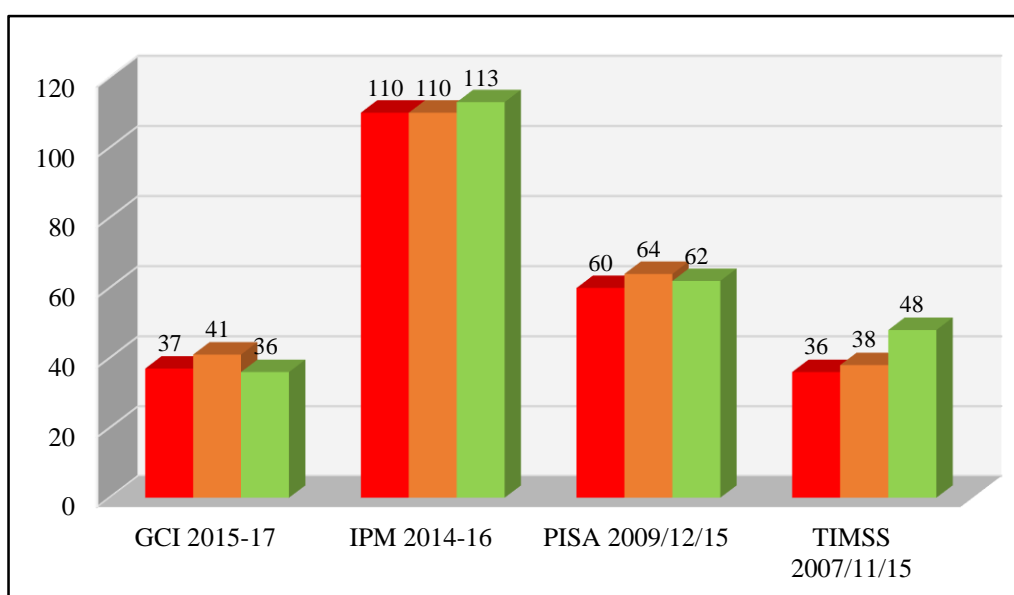
Dalam laporan *World Economic Forum* tentang *Global Competitiveness Index/Indeks Daya Saing* negara-negara di dunia tahun 2017, menunjukkan peringkat Indonesia berada di pada posisi ke-36 dari 137 negara (World Economic Forum, 2017). Faktor kesehatan dan pendidikan dasar menempati peringkat ke-94 dan faktor pendidikan menengah dan tinggi serta pelatihan menempati peringkat ke-64. Peringkat Indonesia naik dari 37 tahun 2015 dan 41 di tahun 2016. Kemudian Dalam laporan *United Nations Development Programme* tentang *Human Development Index (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* tahun 2016 negara Indonesia berada pada peringkat ke-113 dari 188 negara (UNDP, 2017). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Indonesia masuk dalam kategori ketiga, yaitu *medium human development*. Jika dilihat pada berbagai indikator pendidikan, rata-rata usia bersekolah (*mean years of schooling*) di Indonesia baru 7,9 tahun. Tingkat literasi (*literacy rate*) salah satu indikatornya

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adalah angka melek huruf penduduk berusia minimal 15 tahun di Indonesia baru 93,9%. Banyaknya penduduk berusia minimal 25 tahun yang setidaknya pernah merasakan sekolah menengah di Indonesia (47,3%). Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah dasar (*primary school dropout rate*) Indonesia mencapai 18,1%, padahal rasio guru : siswa Indonesia (1:17). Peringkat Indonesia naik turun dari 110 ke- 113 tahun 2015.



Gambar 1.1 Ranking GCI, IPM, PISA, dan TIMSS Indonesia

Hasil literasi PISA (*Programme for International Students Assessment*)/ 2015 yang dirilis pada tanggal 6 Desember 2016 oleh *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang melibatkan 540.000 siswa menempatkan Indonesia masuk ranking 9 terbawah dari 72 negara di dunia (OECD, 2016). Hal ini menunjukkan kompetensi sains, matematika, dan literasi siswa Indonesia masih rendah (Kemendikbud, 2016). Peringkat Indonesia stagnan ke-60 tahun 2009 dan ke-64 tahun 2012. Mengacu pada laporan *International Study Center* (IEA) hasil TIMSS (*Trends International in Mathematics and Science Study*) tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 48 negara pada kategori pencapaian matematika dan peringkat ke-45 dari 48 negara pada kategori

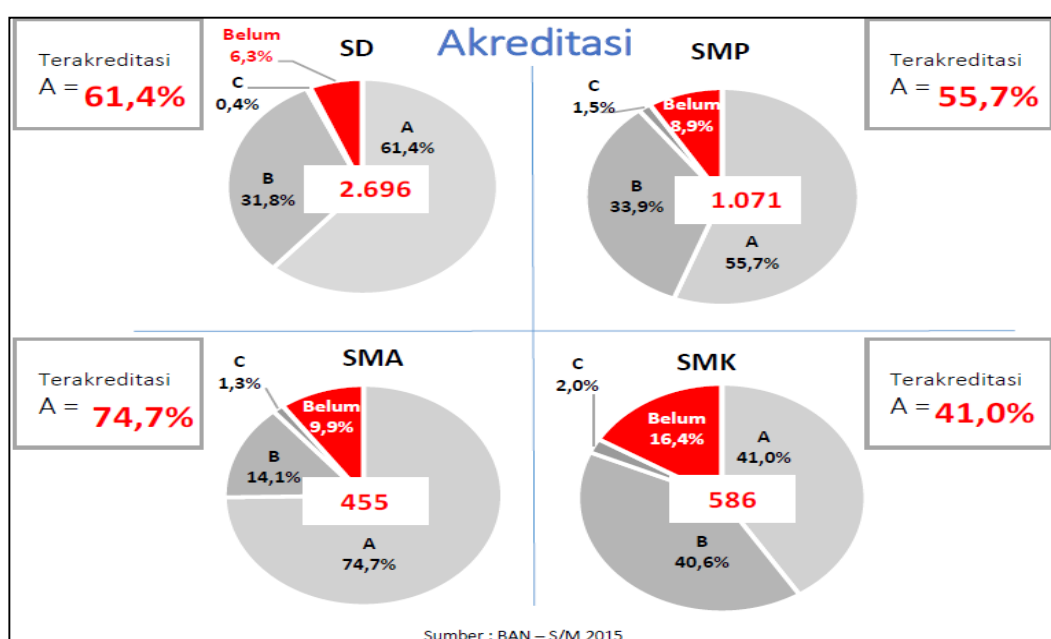
Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pencapaian *Science* (IEA, 2015). Berdasarkan hasil TIMSS diperoleh bukti bahwa siswa Indonesia masih lemah pada kemampuan orde tinggi. Mayoritas siswa belum mampu menggabungkan beberapa fakta, memadukan konsep, mengaplikasikan, apalagi mengkomunikasikan hasil penalaran (Rahmawati, 2017).

Kemudian jika kita melihat mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan beberapa fenomena sebagai berikut ini. Hasil akreditasi sekolah berdasarkan data BAN-S/M Tahun 2015 seperti gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2 Akreditasi Sekolah DKI Jakarta Tahun 2015

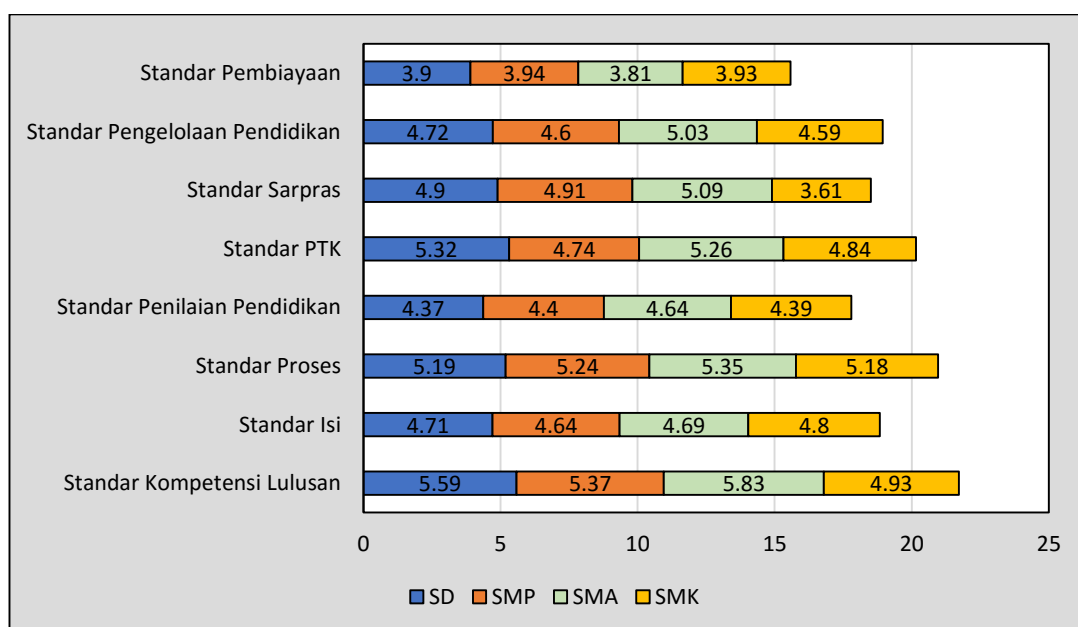
Dari gambar tersebut terlihat masih terdapat 32,4% jenjang SD terakreditasi di bawah A dan 6,3% sekolah belum terakreditasi. Pada jenjang SMP terdapat 35,4% terakreditasi di bawah A dan 8,9% belum terakreditasi. Jenjang SMA yang terakreditasi di bawah A sejumlah 15,4% dan 9,9% belum terakreditasi. Jenjang SMK sejumlah 42,6% sekolah terakreditasi di bawah A, dan 16,4% belum terakreditasi (LPMP DKI Jakarta, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2016) bahwa terjadi peningkatan Standar Nasional Pendidikan dari hasil akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2013.

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan data mutu pendidikan yang ditarik dari Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang diintegrasikan dalam aplikasi Dapodik tentang capaian sekolah terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 tampak seperti dalam gambar 1.3. Berdasarkan gambar 1.3 di bawah dapat kita simpulkan bahwa secara umum mayoritas satuan pendidikan masih pada level menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP) 3. Tingkat SD dengan rerata capaian 4,84 dan tingkat SMP dengan rerata capaian 4,73. Sedangkan untuk tingkat SMA dengan rerata capaian 4,96 dan tingkat SMK dengan rerata capaian 4,53.



Gambar 1.3 Capaian SNP di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional bisa kita cermati dalam beberapa peraturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 31 ayat (3) menyebutkan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Nasional bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum. Dalam Pasal 91 bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Mengacu pada sasaran pembangunan pendidikan yang hendak dicapai, arah kebijakan pendidikan pembangunan nasional 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kemendikbud, 2015). Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yaitu : “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Kemendikbud menetapkan misi yang ke-3 yaitu: “ mewujudkan pembelajaran yang bermutu”. Misi ini dapat dimaknai bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu dengan meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan, serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global (Kemendikbud, 2015).

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kemendikbud. Perincian SP dan IKP Program Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka untuk peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dasar dan menengah dapat dilihat tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

KODE	SP/IKP	Sat	Base Line 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sp 3.7	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)							
IKP 3.7.1	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya berdasarkan SNP	%	0	14	29	52	76	95

Sumber: (Kemendikbud, 2015)

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Peranan LPMP sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tingkat provinsi. Bentuk kegiatan penjaminan mutu yang dapat dilakukan adalah melakukan pemetaan, supervisi dan memberikan fasilitasi mutu pendidikan kepada *stakeholders*, yang dalam hal ini khusus untuk LPMP DKI Jakarta adalah seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah serta dinas pendidikan dasar dan menengah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dikdasmen, LPMP mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah (Kemendikbud,2016). Penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan komite sekolah. Sistem penjaminan mutu pendidikan Internal di sekolah dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: i) pemetaan mutu; ii) penyusunan rencana peningkatan mutu; iii) implementasi rencana peningkatan mutu; iv) evaluasi/audit internal; v) penetapan standar mutu pendidikan. Hasil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah terjadinya peningkatan mutu pendidikan sekolah yang ditunjukkan oleh peningkatan skor Standar Nasional Pendidikan (SNP) dari waktu ke waktu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat diperlukan sekolah karena dalam proses pembelajaran diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan sehingga arah dan tujuan pencapaian standar nasional pendidikan dapat secara jelas dan terukur tingkat ketercapaiannya. Karena banyak sekolah yang belum memenuhi atau mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka diperlukan pelatihan dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar sekolah menerapkan seluruh siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara mandiri dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016. Disamping itu, selama ini sekolah membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah tidak berdasarkan analisis pemetaan mutu sekolah. Dalam siklus SPMI ada satu tahapan yaitu pemetaan mutu sekolah, sehingga sekolah mengetahui dimana letak kekurangan atau kelemahan dari 8 standar. Dari hasil analisis inilah sebagai dasar bagi sekolah dalam membuat rencana kegiatan berdasarkan 8 standar. Sehingga pos-pos pengeluaran sekolah yang berasal dari dana BOP maupun BOS lebih terarah dan tepat sasaran sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kemudian di dalam siklus SPMI juga ada tahapan perencanaan peningkatan mutu sekolah, ketika sekolah misalnya lemah dalam satu standar ada indikator dan

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

subindikator, sekolah bisa membuat program peningkatan mutu sekolah yang mungkin dilaksanakan.

LPMP sebagai subsistem Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memegang peranan kunci dalam mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan di sekolah dalam hal mengembangkan kapasitas SDM dan pengembangan Sekolah Model dengan memberikan pelatihan dan pendampingan. Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi SNP sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut. Pemilihan sekolah model (Kemendikbud, 2016) memperhatikan beberapa kriteria antara lain: 1) sekolah belum memenuhi SNP; 2) seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pengembangan sekolah model; 3) adanya dukungan dari pemerintah daerah. Sasaran program Sekolah Model Penjaminan Mutu di Kota Jakarta Selatan pada tahun 2017 berjumlah 23 sekolah. meliputi semua jenjang pendidikan dengan rincian SD 11 sekolah, SMP 4 sekolah, SMA 4 sekolah, SMK 2 sekolah.

Sebelum fasilitator melakukan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ke sekolah terlebih dahulu diberikan pelatihan fasilitator daerah. Pelatihan SPMI dari fasilitator nasional kepada fasilitator daerah dilaksanakan selama 5 hari sebanyak 40 jam pelajaran. Pelatihan ini dilakukan dengan pola *whole school approach*. Pelatihan dilakukan berdasarkan empat prinsip, yaitu sebagai berikut.

- a. *Experiential learning*. Pelatihan ini bertumpu pada pengalaman peserta sehingga proses belajar tidak hanya mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman yang dialami.
- b. Berfikir secara kritis dan kreatif (*critico-creative thinking*). Pelatihan ini diselenggarakan dengan memasukkan metode-metode yang memungkinkan

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

para peserta mengembangkan pemikiran kritis yang bersifat konstruktif, kreatif, dan sebanyak mungkin berangkat dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta.

- c. Belajar bersama (*collective learning*). Pelatihan ini dimaksudkan sebagai proses belajar bersama antara sesama peserta, peserta dan fasilitator. Perbedaan gaya belajar peserta menjadi kekayaan yang dapat dimanfaatkan bersama.
- d. Dapat diterapkan (*applicable*) atau bersifat praktis sesuai kebutuhan peserta, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pengawas.



Gambar 1.4 Gambar Tahapan Proses Pelatihan SPMI

Penelitian yang dilakukan oleh (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012) bahwa pelatihan secara berkelanjutan terhadap guru akan meningkatkan profesionalisme sehingga guru sehingga mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya peningkatan mutu pendidikan akan terwujud menjadi kenyataan. Hal serupa disampaikan oleh (Uchtiawati & Zawawi, 2014) bahwa melalui pelatihan manajemen mutu akan meningkatkan pemahaman tentang manajemen mutu kerjasama sekolah sebesar 15,55 % dalam pelatihan.

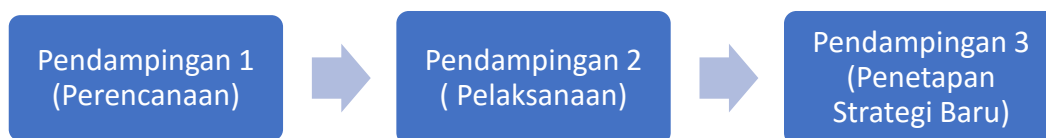
Supaya seluruh komponen sekolah model dapat mengimplementasikan penjaminan mutu internal dengan optimal, maka sekolah membutuhkan pendampingan dari fasilitator. Dalam pendampingan, peran pendamping sangat diperlukan karena dapat secara langsung mendampingi sekolah, memberi motivasi, dan memberi penguatan bagi sekolah model yang didampinginya. Untuk itu, kegiatan pendampingan sekolah model penjaminan mutu sangat strategis dalam memastikan setiap satuan pendidikan khususnya sekolah model dalam memahami dan menerapkan SPMI secara utuh (LPMP DKI Jakarta, 2017). Proses pendampingan SPMI sekolah model dilakukan oleh fasilitator daerah yang dilaksanakan sebanyak tiga kali masing-masing selama 7 jam pelajaran.

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendamping dari LPMP DKI Jakarta melakukan tatap muka pendampingan dan pemantauan terhadap seluruh alur pengembangan sekolah model.



Gambar 1.5 Alur Pendampingan Sekolah Model

Menurut (Fahmi & Widyanesti, 2017) proses pelatihan dan pendampingan kepada guru-guru matematika dalam pembuatan e-learning menciptakan belajar mengajar yang efektif dan efisien di kelas dan mempertinggi mutu belajar mengajar. Hal senada juga disampaikan oleh (Giyarsih, 2016) bahwa supervisi akademik melalui proses pendampingan terhadap guru di sekolah binaan oleh pengawas menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut Timothy Gallwey (USAID PRIORITAS, 2013:42) pendampingan membantu dan memfasilitasi belajar, memecahkan masalah, umpan balik, dan refleksi yang terpisah dari evaluasi. Disamping itu, pendamping memberi petunjuk, saran, membelajarkan, melatih dengan menggunakan pengalaman, keahliannya, dan peduli untuk meningkatkan kualitas tindakan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Menurut Stephen Murgatroyd dan Colin Morgan, (1994) dalam (Suhardan, 2014: 95) salah satu konsep dasar dalam memahami konsep mutu, yaitu *quality assurance* (QA) yang merujuk pada ketentuan berdasarkan standar, persyaratan mutu, dan ketepatan metode seperti yang telah ditetapkan oleh badan ahli, mutu harus melalui uji penilaian yang sesuai dengan persyaratan standar. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu ditetapkan oleh BSNP. Fungsi SNP menurut Tilaar (2006) yaitu sebagai : 1) pengukuran kualitas pendidikan, 2) pemetaan masalah pendidikan, dan 3) penyusunan strategi dan

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rencana pengembangan sesudah diperoleh data-data dari evaluasi secara nasional seperti Ujian Nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim (2007:56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu: kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan jaringan kerjasama. Kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah, guru, karyawan dan semua unsur pendidikan mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Menurut Djam'an Satori (Satori, 2016: 139) TQM dapat dipahami sebagai filosofi perbaikan tanpa henti hingga tujuan organisasi dapat dicapai dan dengan melibatkan segenap komponen dalam organisasi tersebut. *Continuous quality improvement* adalah proses penjaminan mutu berkelanjutan yang menempatkan budaya mutu (*quality culture*) sebagai bagian dari kehidupan satuan pendidikan. Sehingga *quality assurance* merupakan tanggung jawab satuan pendidikan sendiri yang menempatkan sistem penjaminan mutu sebagai bagian integral dari manajemen sistem. Artinya, upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak bisa diwujudkan tanpa ada usaha perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di setiap satuan pendidikan yang didukung oleh semua warga sekolah. Sebagaimana di sekolah MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng yang menerapkan prinsip TQM (*total quality management*) diantaranya keterlibatan semua pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan, membuat program dan menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan, serta melakukan perbaikan-perbaikan. (Indana, 2017).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dalam pertanyaan: “Bagaimana pengaruh pelatihan dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan tahun

2017? ". Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran umum Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi fasilitator sekolah model di kota Jakarta Selatan ?
- b. Bagaimana gambaran umum Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sekolah model di kota Jakarta Selatan ?
- c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari pelatihan SPMI terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan ?
- d. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pendampingan SPMI terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan?
- e. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pelatihan dan pendampingan SPMI terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan?
- f. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan sebelum dan sesudah Pelatihan dan Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empirik, mengolah data dan menguji kebermaknaan pengaruh pelatihan dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan sekolah model di Kota Jakarta Selatan. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Memperoleh gambaran umum program Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi fasilitator sekolah model di kota Jakarta Selatan ?
- b. Memperoleh gambaran umum program Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sekolah model di kota Jakarta Selatan ?

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Teranalisisnya pengaruh pelatihan SPMI terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan.
- d. Teranalisisnya pengaruh pendampingan SPMI terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan.
- e. Teranalisisnya pengaruh pelatihan dan pendampingan SPMI terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan.
- f. Teranalisisnya perbedaan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah model di Kota Jakarta Selatan sebelum dan sesudah Pelatihan dan Pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut.

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam pengembangan ilmu tentang pengaruh pelatihan dan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat.
 - Bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pijakan bagi pemilihan strategi untuk meningkatkan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah.
 - Bagi LPMP, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi dalam mengambil kebijakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah.
 - Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi untuk selalu meningkatkan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah dalam upaya mewujudkan budaya mutu

Sulaeman Ibrahim, 2018

PENGARUH PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TERHADAP KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEKOLAH MODEL DI KOTA JAKARTA SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Bagi para peneliti, penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian pengembangan untuk menemukan model pendekatan meningkatkan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sekolah yang lebih baik.